



Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik

Linton Naibaho¹, Johan Pardamean Simanjuntak², Yana Sebha Pasaribu³, Roselli Anjelina Lumbansiantar⁴, Nelly Moria Hutapea⁵, Ivana Theo Philia⁶, Kania Nova Ramadhani⁷, Tri Santa Mahulae⁸

¹⁻⁸Universitas Negeri Medan

E-mail: lintonrajaoloan@gmail.com¹, simanjuntakjohan46@gmail.com², pasaribuyanasebha@gmail.com³, sellylumbansiantar@gmail.com⁴, nellymoria0@gmail.com⁵, ivanasmjntk@gmail.com⁶, ivanasmjntk@gmail.com⁷, trisantamahulae@gmail.com⁸

Abstract. *Money Politics is an attempt to bribe voters by providing money or services so that voters' vote preferences can be given to a briber. Political money is no longer surprising, it is a common thing that happens when it comes to elections, parties do various things to get votes from the people, this political money has been passed down from generation to generation. Violations that often occur during elections include the widespread practice of money politics. Money politics is considered a practice that injures democracy. Elections are a big party in democracy where every citizen is free to give their voting rights to the parties that are nominating. In the lead up to the election, many candidates are chosen by the party to take part in the community by giving gifts. This is what we often refer to as "Money politics", this cannot be avoided, because of this people become unstable in their choices. The aim of this research is to find out the political challenges in general elections, find out what factors cause the practice of money politics in general elections and to find out how to face these political challenges. The research method used by the author is a qualitative method, which is descriptive research and tends to use analysis. The aim is to explain a phenomenon in as much depth as possible by collecting data in as much depth as possible, with greater emphasis on the depth of the data obtained. Students have an important role in fighting money politics. As students who study politics, it is only natural that they can form public awareness by providing political education or education for the community or others around us about the importance of integration in politics, and encouraging transparency and accountability in general elections and so that they are more aware of the dangers of money politics so that with Education to the public will increase people's understanding of the dangers of money politics and they will be wiser in choosing a good and wise leader. And society will not be more easily influenced by using political money. By getting involved in anti-money politics campaigns and fighting for policies that reduce corruption and the influence of money in politics, students can help create a more just and democratic political system.*

Keywords: *Students, Political Challenges, Political Money*

Abstrak. Politik Uang (*Money Politic*) merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Money politik bukanlah hal mengejutkan lagi, sudah hal biasa terjadi pada saat menuju pemilu, para partai melakukan berbagai hal untuk mendapatkan suara dari rakyat, money politik ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi. Pemilu merupakan suatu pesta besar dalam demokrasi yang dimana setiap masyarakat bebas memberikan hak suara mereka terhadap para partai yang mencalonkan, dalam menuju pemilu banyak nya para kandidat yang dipilih oleh partai tersebut untuk turun dalam lingkungan masyarakat dengan memberi buah tangan ini lah yang sering kita sebut sebagai "Money politik", hal ini tidak dapat terhindarkan, karena hal ini masyarakat menjadi goyah terhadap pilihannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk untuk mengetahui tantangan politik pada pemilihan umum, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktiek money politik pada pemilihan umum dan Untuk mengetahui bagaimana menghadapi tantangan politik terseebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yang dimana metode ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Tujuannya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, dengan lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam melawan politik uang. Sebagai mahasiswa yang belajar akan politik sudah sewajarnya mereka dapat membentuk kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi atau pendidikan politik bagi masyarakat ataupun sesama sekitar kita tentang pentingnya integrasi dalam politik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pemeeilihan umum dan supaya lebih mengetahui akan bahaya *money politic* sehingga dengan adanya edukasi kepada

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 03, 2023

* Linton Naibaho, lintonrajaoloan@gmail.com

masyarakat akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahayanya *money politik* dan mereka akan lebih bijak lagi dalam memilih seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Dan masyarakat tidak akan lebih mudah lagi dipengaruhi dengan menggunakan money politik tersebut. Dengan melibatkan diri dalam kampanye anti-money politik dan memperjuangkan kebijakan yang mengurangi korupsi dan pengaruh uang dalam politik, mahasiswa dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih adil dan demokratis.

Kata kunci: Mahasiswa, Tantangan Politik, Money Politik

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana yang ditempuh Pemerintah dalam upaya penegakan proses demokratisasi di Indonesia. Warga negara secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan sebagai presiden. Warga negara dapat memilih wakilnya melalui pemilu berpartisipasi dalam badan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan dengan baik agar hasilnya mencerminkan keinginan rakyat.

Pemilih dalam posisi *indifferent* secara ekonomis. Artinya memilih suatu kandidat tidak menjadi lebih mahal atau murah dibandingkan dengan memilih kandidat lain secara ekonomis pada saat 'membeli' (kendati harus diingat bahwa sesungguhnya pilihan salah yang dilakukan oleh banyak orang akan berakibat pada kebijakan politik dan selanjutnya pada perekonomian masyarakat secara umum, termasuk perekonomian individu). Hal ini juga yang mengarahkan pada pemahaman bahwa memilih selama pemilu lebih didorong oleh alasan-alasan non-ekonomis seperti ideologi dan Budaya.

Kini, pada masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Dengan kata lain, visi misi serta latar belakang parpol pengusung tidak diperhatikan oleh masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh parpol kian terkikis. Dengan cara money politics hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi. Hal ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas dan kapabilitas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat.

Saat ini, Indonesia membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang ada saat ini sangat rentan dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan berjalan di tempat atau bahkan terhenti.

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi. Pemilu merupakan suatu pesta besar dalam demokrasi yang dimana setiap masyarakat bebas memberikan hak suara mereka terhadap para partai yang mencalonkan, dalam menuju pemilu banyak nya para kandidat yang dipilih oleh partai tersebut untuk turun

dalam lingkungan masyarakat dengan memberi buah tangan ini lah yang sering kita sebut sebagai “Money politik”, hal ini tidak dapat dihindarkan, karena hal ini masyarakat menjadi goyah terhadap pilihannya.

Politik Uang (*Money Politic*) merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Money politik bukanlah hal mengejutkan lagi, sudah hal biasa terjadi pada saat menuju pemilu, para partai melakukan berbagai hal untuk mendapatkan suara dari rakyat, money politik ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini masih diupayakan oleh pemerintah agar dapat terjadinya keseimbangan politik, banyaknya para partai melakukan money politik yang dapat menarik simpati rakyat, sehingga rakyat goyah terhadap pilihannya tidak lagi melihat sudut pandang terhadap partai tersebut

Politik Uang (*Money Politic*) adalah salah satu cara atau bentuk pemberian atau janji yang secara nyata kepada seseorang untuk mendukung calon tertentu dengan menggunakan haknya dalam suatu pemilihan secara melawan hukum. Hal ini merupakan suatu kejahatan terhadap demokrasi yang dimana menggerakkan seseorang menggunakan haknya dengan bermacam-macam bentuk, tapi mempunyai tujuan adalah untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dari para simpatisan masyarakat untuk menentukan kemenangan dalam pemilihan umum. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berpikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang tidak kan mudah untuk dicegah dan dihentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita. Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka akan sulit mendapatkan pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja untuk rakyat karena pemimpin-pemimpin tersebut dilahirkan dengan cara yang tidak sah. Dan pastinya berdampak dengan tatanan demokrasi yang diciptakan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan dapat menghambat berkembangnya nilai-nilai demokrasi, prinsip kejujuran dan integritas yang adil.

Dengan demikian dibutuhkan cara untuk menanggulangi pelanggaran politik uang tersebut, agar pejabat yang dihasilkan merupakan pejabat yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta memenuhi kelima asas pemilihan umum tersebut. Hal ini diperlukan sebab jika tidak ditemukan cara yang benar (jujur dan adil) maka akan terjadi ketidakadilan, calon peserta pemilu dapat menggunakan kekuatan finansial yang tinggi untuk mengalahkan calon yang tidak/lemah dalam hal finansial.

KAJIAN TEORITIS

Partisipasi politik pada Pemilu 2024

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, DPD maupun pemilu kepala daerah. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula karena akan menggunakan hak pilih lagi pada Pemilu tahun 2024. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang. Sosialisasi politik kepada pemilih pemula adalah bagian dari suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan demokrasi yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat orang tersebut berada. Di sisi lain, sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yang merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. (Sitabuan, 2020) Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam sebuah negara demokratis. Masyarakat sebagai warga negara yang memegang peranan penting dalam menjalankan politik. Dalam membentuk pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan partisipasi seluruh warga negara dalam mewujudkan pembangunan yang baik untuk maju dan berkembang. Salah satu partisipasi pemilih pemula adalah untuk mendukung pemerintahan adalah partisipasi politik. (Elman Sidni Almuntator et al., 2022a)

Partisipasi pemilih muda harus dibangun karena suara generasi muda merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proses keberlanjutan kepemimpinan daerah dan nasional. Rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dapat mendorong partisipasi pemilih pemula tinggi untuk memberikan hak suara. Suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari money politics yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling

tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi yang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu Pemilih pemula yang terdaftar atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi sagmen yang sangat unik, sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, penyebutan kata unik untuk para pemula sebab pemilih pemula sangat antusiasme tinggi, relatif dan rasional, haus akan perubahan dan sayangnya sangat tipis akan kadar polusi pragmatisme. Proses Pemilu bukan hanya sekadar upaya memperoleh suara pemilih, namun sepatutnya lebih substansial yaitu peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai masyarakat khususnya pemuda yang sudah mulai apatis sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam proses pemilu sebagai proses legal pergantian kepemimpinan daerah dan juga nasional. Pemuda sebagai generasi penerus tentunya juga harus belajar kepada yang lebih paham tentang pemilu karena suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari money politics yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Namun, tentu bukan persoalan jumlah suara semata, melainkan yang lebih penting adalah pendidikan politik bagi generasi muda pedesaan seperti desa Plalangan. Tingkat Partisipasi yang tinggi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab generasi muda terhadap keberlangsungan Agenda Pemilu 5 tahunan. (Elman Sidni Almuntasor et al., 2022a)

Peran Mahasiswa Dalam Politik

Dilihat kembali dalam sejarah di Indonesia, dasar perubahan khususnya pada dunia politik hampir selalu dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa terbukti mampu menjadi pelopor dalam sejarah Bangsa. Mahasiswa merupakan bagian dari rakyat, bahkan ia merupakan rakyat itu sendiri. Mahasiswa sebagai tumpuan berbagai pihak. Mereka sering disebut sebagai harapan bangsa, harapan negara, harapan masyarakat, harapan keluarga bahkan harapan dunia. Mahasiswa sebagai agen perubahan (Agen of Change) seringkali menjadi pemicu dan pemacu perubahan-perubahan dalam masyarakat (Yoseph Yermias,2018).

Secara empiris, dalam sejarah Indonesia mahasiswa telah membuktikan dirinya sebagai agen perubahan sejarah. Seperti yang diketahui mahasiswa sangat berperan penting sebagai kekuatan dan subjek sejarah dalam perkembangan reformasi di Indonesia. Kekuatan itu sungguh ada dan bentuknya yang paling nyata adalah gerakan mahasiswa yang tidak kunjung henti-hentinya pada akhir ini.

Gerakan mahasiswa saat ini diwujudkan dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan Pemerintah/Penguasa. Terutama, ketika maraknya Korupsi, ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap hak-hak rakyat. Mahasiswa berperan sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas kepeduliannya terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak bagi perbaikan kualitas hidup bangsa. Jadi, gerakan yang dilakukan mahasiswa berupa koreksi atau kontrol atas kejadian politik yang melenceng dan merugikan rakyat (Yoseph Yermias,2018).

Menurut Dr. Mohtar Mas'ood, secara fungsi, mahasiswa mempunyai dua peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, mahasiswa sebagai manager dan kedua mahasiswa sebagai pencetus gagasan. Peran yang pertama lebih berorientasi pada tindakan, yaitu lebih menekankan masalah "how to get things done" sehingga peran ini lebih memerlukan bekal keilmuan yang menunjang penyelesaian masalah dalam suatu bidang ilmuilmu manajemen yang bersifat teknokrasi. Dan peran kedua lebih berorientasi pada kegiatan pemikiran, yaitu lebih pada kerja "asah otak" untuk melahirkan kemungkinan alternatif sehingga dalam prakteknya peran ini lebih memerlukan bekal keilmuan yang mengutamakan kontemplasi

Tantangan politik 2024

Sejak dilaunching tahapan Pemilu oleh KPU pada 14 Juni 2022 lalu, dinamika perpolitikan di Indonesia, mulai dinamis. Terutama sejak sejumlah Parpol dan gabungan Parpol mulai menjalin komunikasi-komunikasi politik untuk saling membangun koalisi. Demikian pula saat masuk tahapan pencermatan data pemilih dan kini pencalegkan. Dinamika terus berubah dan berkembang.

Terlepas dari itu, dipastikan akan ada banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, para penyelenggara Pemilu dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan Pemilu berkualitas di Tahun 2024 mendatang. Selain tentunya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanye. Masih ada hambatan, ancaman dan tantangan lain diluar itu Salah satunya tentu soal praktek money politik.

Seperti pada Pemilu 2019 lalu, praktek-praktek politik uang, kemungkinan masih akan mendominasi di Pemilu 2024. Hal ini didukung sikap masyarakat / pemilih di Indonesia yang cenderung pragmatis. Para politikus utamanya para caleg dan tim suksesnya masih akan melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati pemilih. Dimungkinkan segala cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Halal atau tidak, melanggar atau tidak, mereka tidak memikirkannya. Terpenting bagaimana caranya agar mereka bisa menang dan terpilih.

Praktek Money Politik kemungkinan akan lebih terpampang nyata tidak seperti Pemilu sebelumnya yang lebih banyak dilakukan saat menjelang hari pemungutan suara atau yang populer disebut "Serangan Fajar". Pada Pemilu 2024, "transaksi suara" dengan para pemilih kemungkinan akan terjadi secara fulgar. Bahkan kemungkinan, transaksi akan dilakukan tidak dengan "person to person", tapi dengan kelompok/gabungan masyarakat. Bisa jadi dilakukan oleh Caleg/Tim Sukses dengan perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan RT/RW, Kampung/Dusun atau bahkan desa. Bisa juga dengan kelompok-kelompok masyarakat/kelompok keagamaan / organisasi pemuda yang lain. Dan kemunglikan tidak lagi bicara nilai Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu saja, tapi sudah jutaan untuk satu kelompok masyarakat tersebut.

Hal kedua bentuk hambatan, ancaman dan tantangan yang akan dihadapi adalah politik identitas. Untuk diketahui, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Dalam hal ini, identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya .

Bawaslu selaku Pengawas Pemilu yang misinya diantaranya meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Kemudian meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel, tentu yang paling akan bekerja keras untuk menghadapi berbagai hambatan, ancaman dan tantangan tersebut.

Money politik pemilu 2024

Politik uang merupakan tindakan yang merendahkan nilai-nilai demokrasi karena bertentangan dengan prinsip pemilu. Di tengah tahun politik yang penuh tantangan, kebijakan moneter merupakan topik yang tidak dapat diabaikan. Kegiatan ini melibatkan penggunaan uang atau sumber daya keuangan lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilu atau keputusan politik. Uang politik melibatkan banyak pihak berbeda yang berpartisipasi dalam proses politik. Partai-partai tersebut antara lain calon politik, partai politik, pendukung politik, dan kelompok kepentingan. Mereka yang mempunyai sumber daya keuangan yang cukup sering mengeksploitasinya demi keuntungan politik. Monetisasi politik adalah praktik penggunaan uang atau sumber daya keuangan lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilu atau keputusan

politik. Hal ini mencakup berbagai bentuk seperti pembelian suara, pendanaan kampanye politik yang berlebihan, atau pemberian hadiah atau imbalan kepada pemilih. Persoalan efektivitas kebijakan moneter pada tahun 2024 menjadi penting karena tahun ini merupakan tahun demokrasi, dimana pemilu dan proses politik lainnya sedang berjalan lancar. Tahun politik ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan praktik kebijakan moneter.

Uang politik bisa muncul di berbagai negara di dunia, termasuk dalam konteks tahun politik 2024. Praktik ini bisa terjadi dalam pemilu, pemilu lokal, atau bahkan pemilu di banyak organisasi politik kecil. Uang politik masih menjadi perdebatan karena potensinya merusak demokrasi dan melemahkan proses politik yang adil dan transparan. Meski dilarang di banyak negara, namun kegiatan ini tetap eksis dan berhasil dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki sumber keuangan memadai. Efektivitas kebijakan moneter pada tahun 2024 masih menjadi pertanyaan pelik. Dampak kebijakan moneter dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran pemilih, ketatnya undang-undang, dan upaya organisasi pengawas untuk mencegah dan mendeteksi perilaku tersebut. Di tahun demokrasi 2024, kebijakan moneter masih menjadi isu penting yang mempengaruhi keberlangsungan proses politik yang adil dan transparan. Meskipun pelarangan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan, upaya juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pemilih dan memperkuat lembaga pengawasan untuk mengurangi pengaruh kebijakan moneter di negara-negara demokrasi.

Penelitian Yang Relevan

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khoiril Padilah dan Irwansyah (2023) Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya (2023). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Money politik ini muncul karena adanya obesisi menjadi pimpinan yang dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur. Money politik merupakan tindakan yang merusak nilai demokrasi karena bertentangan dengan asas pemilu sendiri. Untuk mencegah, dan menangani politik uang pada pemilu 2024 dengan Bawaslu bersama KPU memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan cara memberikan mulai dari tingkat RT/RW, karena terjadinya praktik money politik dimulai dari wilayah terkecil dan terpencil. Pencegahan praktek money politik juga dapat dilakukan dengan cara best practice yang telah dilakukan oleh negara—negara demokrasi mapan ataupun baru, penanganan masalah money politik juga negara luar dapat disesuaikan dengan budaya lokal di Indonesia. (Padilah & Irwansyah, 2023)

Pada peneliti terdahulu selanjutnya yang ditulis oleh Moh. Elman Sidni Almntasor dkk dalam jurnal yang berjudul Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan (2022). Menjelaskan bahwa Partisipasi Pemilih

Pemula memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula. Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam sebuah negara demokratis. Masyarakat sebagai warga negara yang memegang peranan penting dalam menjalankan politik. Selanjutnya pada jurnal ini juga menjelaskan tentang Partisipasi pemilih muda harus dibangun karena suara generasi muda merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proses keberlanjutan kepemimpinan daerah dan nasional. Rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dapat mendorong partisipasi pemilih pemula tinggi untuk memberikan hak suara. Suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari money politics yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas. (Elman Sidni Almantasor et al., 2022b)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, ialah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dimana metode ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Tujuannya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, dengan lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Universitas Negeri Medan tepatnya di Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dimana penelitian dilakukan dengan wawancara terbuka.

2) Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal wawancara langsung, yaitu dimulai tanggal 10 sampai 12 Oktober 2022.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dapat berupa orang, lembaga (organisasi) yang utama memiliki sifat keadaannya terkait topik penelitian. Menurut M. Amirin(1995), Definisi subjek penelitian adalah bagian sumber riset yang ditentukan guna memperoleh keterangan penelitian atas segala sesuatu yang mengenainya topik riset sehingga mampu diperoleh keterangan. Subjek Penelitian ini adalah Pemerintah, KPU, Bawaslu, Pihak yang berwenang. Objek penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Negeri Medan

Instrumen dan Teknik pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2019) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Indrawan dan Yaniawati (2014, hlm. 122) mengemukakan bahwa Instrumen penelitian adalah alat pengukur yang merupakan faktor penting dalam menghimpun data yang diharapkan dalam suatu penelitian.

Sedangkan menurut Sanjaya Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan berupa data empiris (Sanjaya, 2015). Riduwan (2010), Teknik pengumpulan data ialah metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Djaman Satori dan Aan Komariah (2011), Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah ialah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Sugiyono (2013), Arti teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang dimana Menurut Danang Sunyoto (2013), Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan melalui wawancara terbuka/langsung.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data berupa wawancara terbuka, dimana pertanyaan sudah disediakan dan responden akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan.

Kisi-kisi Instrumen

Dalam penelitian yang kelompok kami lakukan, adapun kisi-kisi instrumen penelitian yang kami gunakan adalah berupa pertanyaan, yang dimana pertanyaannya terdiri dari 10 pertanyaan.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang saudara ketahui tentang Pemilu?
2. Menurut saudara apakah Pemilu di Indonesia sudah berjalan dengan baik?
3. Bagaimana pandangan saudara ataupun bagaimana anda menyikapi tentang banyaknya oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti melakukan money politik?
4. Bagaimana cara saudara untuk menolak praktek money politik dan bagaimana saudara berpartisipasi atau bagaimana peran saudara dalam menghadapi tantangan politik tadi, yaitu adanya praktek money politik tersebut?
5. Menurut saudara apakah memberikan sembako saat kampanye termasuk money politik?
6. Menurut saudara masalah apa yg terjadi jika praktek money politik dibiarkan?
7. Efek buruk apa yang akan terjadi apabila money politik terjadi dikalangan mahasiswa?
8. Apakah praktik money politik bisa dihentikan?
9. Sebagai mahasiswa, upaya apa saja yang anda bisa lakukan dalam membangun sistem politik yang lebih bersih dan transparan menjelang tahun 2024?
10. Menurut saudara, Harapan apa yg bisa Anda sampaikan agar pemerintah dapat mengatasi permasalahan mengenai money politik yg terjadi di Indonesia ini?

Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi, sedangkan dalam pengertian bisnis, data adalah Sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan faktor atau variabel yang Dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan pertanyaan langsung kepada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode wawancara. Peneliti menggunakan 15 responden sebagai sampel. Proses wawancara ini dilakukan secara terbuka/langsung terhadap responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Money politik, yang juga dikenal sebagai politik uang merupakan suatu tindakan penggunaan uang atau pemberian imbalan materi dalam bentuk apapun untuk mempengaruhi proses politik, terutama pada saat diadakannya pemilihan umum. Politik uang diakui atau tidak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Money Politik merupakan pengaruh yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Politik dan uang tentunya dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan

antara satu sama lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Hal tersebut disebabkan karena politik itu merupakan arena yang sangat menggiurkan untuk melakukan berbagai macam transaksi.

Money Politik tentunya bukan barang baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, karena sejak awal mula pemilihan secara langsung praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung. Sehingga tentunya harus diwaspadai bersama dalam memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan money politic dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor pendidikan, faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor hukum dan faktor agama yang dijadikan kandidat calon sebagai saaran empuk. Dalam kesimpulan pada hasil riset yang dilakukan oleh penulis mahasiswa PPKn bisa berpartisipasi dengan cara melakukan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat bahwa politik uang itu berbahaya. Karena pada hakekatnya alasannya, masyarakat menjatuhkan pilihan berdasarkan kekuatan finansial peserta pemilu, bukan lagi berdasarkan integritas dan visi misi yang diusung.

Dalam pemahaman mahasiswa PPKn mendapatkan sesuatu berupa sembako atau bantuan perbaikan jalan dari seorang kandidat calon pada pemilu yang sewajarnya dan bukan ada pemaksaan harus memilih kandidat yang memberikan bantuan. Namun dalam situasi tahun politik menuju 2024 pandangan mahasiswa PPKn yang perlu diantisipasi dan dicermati adalah bagaimana seorang kandidat tersebut memberikan bantuan pada masyarakat apakah dengan tujuan pendekatan pada masyarakat atau bantuan tersebut sebagai tali pengikat beban moral pada masyarakat. Masyarakat harus bijak memahami karakter dari kandidat calon supaya tidak terjebak dalam praktek money politik.

Mahasiswa PPKn FIS UNIMED harus berani mengambil sikap kepada jajaran Bawaslu apabila menemukan atau mengetahui praktik politik uang sehingga para pelaku praktik politik uang akan memperoleh efek jera. Harapannya dengan hal tersebut maka masyarakat dapat memahami dan berani menolak praktik politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang, karena mahasiswa PPKn FIS UNIMED adalah bagian dari masyarakat itu juga. Mahasiswa PPKn FIS UNIMED akan bisa mendorong masyarakat untuk menolak politik uang. Caranya harus didekati dengan persoalan kultural. Harus ada keberanian mahasiswa FIS UNIMED untuk menolak politik uang, mahasiwa PPKn FIS UNIMED melarang keluarga untuk menerima uang dari kandidat dalam pesta demokrasi. Baginya, apabila ada orang tua mahasiswa yang menerima uang, maka menjadi tugas mahasiswa PPKn FIS UNIMED untuk ingatkan supaya tidak menerima, Jika dilakukan secara serius dan masif, maka akan berimbas kepada kehidupan demokrasi Indonesia yang bebas politik uang dalam beberapa waktu ke depan. mahasiswa juga

bisa turut berpartisipasi dalam menekan kampanye hitam dan informasi *hoaks*, mahasiswa PPKn FIS UNIMED sebagai kaum intelektual seharusnya tidak mudah menulis atau menyebarkan berita hoaks yang akan menjerumuskan publik dengan informasi yang tidak benar.

Pada hakekatnya peran penting yang bisa diambil oleh mahasiswa PPKn FIS UNIMED dalam pengawasan Praktek Money Politik pemilu tahun 2024 pada riset yang dilakukan oleh penulis antara lain peran proses pendaftaran yakni mahasiswa dapat membantu dalam memberikan penjelasan pada masyarakat yang dimana mahasiswa PPKn FIS UNIMED juga belajar dalam perkuliahan tentang politik. Peran mahasiswa dalam kontestasi politik tahun depan sangat diperlukan. Selain menjadi kontrol sosial, juga agen perubahan yang kontribusinya bisa menjadi bagian kemajuan daerah dan negara. Sebagai individu intelektual, mahasiswa juga dituntut cerdas dalam menentukan pilihannya. Hal lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa PPKn FIS UNIMED harus bekerja membantu calon politisi idealis untuk memenangkan cita-cita politik mereka. Salah satu contohnya dengan mengenalkan gagasan politik mereka kepada rakyat dalam setiap mahasiswa PPKn yang bisa menjadikan demokrasi sistem yang fair adalah kita sendiri. Karena mahasiswa PPKn FIS UNIMED dan orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya alias (Golongan Putih/Golput) tidak boleh berdiam diri, sikap diam dan apatisme kita bisa melanggengkan kekuasaan yang korup. Karena kaum cerdik pandai harus tampil bersikap untuk merubah Indonesia yang lebih baik Mahasiswa PPKn FIS UNIMED harus mampu menjadi inti daripada inti perubahan, harus bisa mengubah proses demokrasi yang kini dibajak oleh para pemilik uang.

Walaupun pada sesungguhnya dalam menanggulangi praktik politik uang ini perlu adanya sentuhan pendidikan politik yang baik di masyarakat desa agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai good citizen. Mahasiswa PPKn FIS UNIMED diharapkan dapat memberikan sumbangsih, bagaimana pengawasan yang baik agar pemilu berjalan jujur dan adil. Mahasiswa tentu punya ide kreatif yang sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, butuh peran serta mahasiswa PPKn FIS UNIMED dalam kesuksesan pemilu melalui pengawasan partisipatif.

Politik uang (*money politic*) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (*voters*) atau [penyelenggara pemilu](#) dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Akhirnya setelah menjabat, dia

akan melakukan berbagai kecurangan, menerima [suap, gratifikasi](#) atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai "*mother of corruption*" atau induknya korupsi. Politik uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara (*vote buying*), para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis. Tentu saja, itu bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih. Perilaku ini biasa disebut *investive corruption*, atau investasi untuk korupsi.

Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam praktek politik uang bukanlah merupakan kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negative dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dalam praktek politik uang. Kerugian jangka panjang tersebut tidak disadari oleh masyarakat selama ini karena kerugiannya tidak dirasakan secara langsung, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, terutama pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah, sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktek politik uang yang dilakukan dalam pemilu tersebut.

KESIMPULAN

Mahasiswa memiliki peran penting dalam melawan politik uang. Sebagai mahasiswa yang belajar akan politik sudah sewajarnya mereka dapat membentuk kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi atau pendidikan politik bagi masyarakat ataupun sesama sekitar kita tentang pentingnya integrasi dalam politik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pemilihan umum dan supaya lebih mengetahui akan bahaya *money politic* sehingga dengan adanya edukasi kepada masyarakat akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahayanya *money politic* dan mereka akan lebih bijak lagi dalam memilih seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Dan masyarakat tidak akan lebih mudah lagi dipengaruhi dengan menggunakan *money politic* tersebut. Dengan melibatkan diri dalam kampanye anti-*money politic* dan memperjuangkan kebijakam yang mengurangi korupsi dan pengaruh uang dalam politik, mahasiswa dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih adil dan demokratis.

SARAN

a) Kepada Mahasiswa PPKn

Dengan menjadi mahasiswa yang sadar akan pentingnya demokrasi yang bersih, anda dapat berperan dalam menciptakan perubahan positif dalam sistem politik di negara anda.

b) Pembaca

Pandangan dari kalangan intelektual terhadap praktek money politik berbeda-beda, kami selaku penulis berharap kepada pembaca supaya lebih mencermati dari setiap pandangan para kaum intelektual.

DAFTAR REFERENSI

- Elman Sidni Almontasor, M., Irfan Faqih, M., Shohibul Hasyim, A. S., & Wahyudi, A. (2022a). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan. *Prosiding Seminar Hi-Tech*, 1(1), 14–15. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Elman Sidni Almontasor, M., Irfan Faqih, M., Shohibul Hasyim, A. S., & Wahyudi, A. (2022b). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan. *Prosiding Seminar Hi-Tech*, 1(1), 14–15. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Amirin, M. Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Indrawan, R. & Yaniawati R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditam
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga
- Riduwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- Sanjaya, W. (2015). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABET